

Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017

The Role of Indigenous Elites in The 2017 Regional Head Elections in Buru Regency

Ahmad Bilal Tuhulele*, Sri Yunanto**

*, ** Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: *lapajo@yahoo.com, **sri.yunanto@umj.ac.id

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 18 Agustus 2022 Direvisi: 4 Oktober 2022 Disetujui: 17 Oktober 2022 doi: 10.22212/jp.v13i2.3500	<p>The traditional elite in the 2017 Buru Regency Head Election has a strategic position for the survival of democracy for five years. The influence and power they have are the keys to the democratic process of the 2017 Pilkada won by the couple Ramli Umasagi and Amustofa Besan (RAMA). This study seeks to understand the existence of local elites on Buru Island and their roles in the 2019 Regent Election. Using the elite theoretical framework proposed by Mosca (1939), Pareto (2011) and Keller (201), synthesized with the theory of political participation formulated by Miriam Budiardjo (Budiardjo,1984), Samuel P. Huntington and Joan Nelson (Huntington and Nelson in Budiardjo,1984), this study finds: First, In the Buru Island community, the local elite has been stratified in the structure; Mat Gugul, Hinolog, and Soa. The figures in this elite not only played a role in social, cultural, and economic functions but also had an increasingly significant political role during the reform period. Second, In the 2017 Pilkada, these elites have carried out intense participation, among others, in conducting political socialization, being the Pilkada committee, mobilizing lower-level constituencies so that the community participates in politics and not abstaining, resolving conflicts if they occur and providing political supports to RAMA candidates who triumphed in this election. This research strengthens theories about the role of local elites or non-governing elites in the political process. Therefore, theoretically, the democratic process should pay attention to the role of local elites who have been proven to have an influence as evidenced in this study.</p> <p>Keywords: Elite; Traditional; Pilkada; Buru; Regency</p>

Abstrak

Elite adat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buru Tahun 2017 memiliki posisi yang cukup strategis bagi kelangsungan demokrasi lima tahunan. Pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi kunci dalam proses demokrasi Pilkada 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Ramli Umasagi dan Amustofa Besan. Penelitian ini ingin memahami eksistensi elit lokal di Pulau Buru dan perannya dalam Pemilihan Bupati 2019. Dengan menggunakan kerangka teori elit yang dikemukakan oleh Mosca (1939), Pareto (2011) dan Keller (2011) yang disintesis dengan teori partisipasi politik yang dirumuskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Huntington dan Nelson dalam Budiardjo,1984), penelitian ini menghasilkan temuan berikut ini: Pertama, dalam komunitas Pulau Buru, elit lokal telah terstratifikasi dalam struktur; Mat Gugul, Hinolog dan Soa. Tokoh-tokoh dalam elit ini tidak hanya berperan dalam fungsi –fungsi social, budaya dan ekonomi, namun juga mempunyai peran politik yang semakin signifikan dalam masa reformasi. Kedua, khusus dalam Pilkada 2017, para elit ini telah melakukan partisipasi yang inten antara lain dalam melakukan sosialisasi politik, menjadi panitia Pilkada, melakukan mobilisasi tingkat bawah agar masyarakat berpartisipasi dalam politik dan tidak Golput, menyelesaikan konflik

jika terjadi dan memberikan dukungan politik kepada kandidat RAMA yang akhirnya memenangkan Pilkada ini. Penelitian ini secara teoritik memperkuat teori-teori tentang peran elit lokal atau elit yang tidak memerintah dalam proses politik. Oleh karena itu secara teoritik proses demokrasi seharusnya memberikan perhatian kepada peran elit lokal yang sudah terbukti memberikan pengaruh sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Elit; Tradisional; Pilkada; Kabupaten, Buru

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari praktek demokrasi di Indonesia dimana masyarakat dapat secara langsung memilih tokoh yang akan memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini Pilkada diharapkan akan memiliki tingkat legalitas yang tinggi bagi pimpinan daerah yang terpilih. Dengan mandat yang tinggi itu pula diharapkan program-program yang semula dikampanyekan akan memberikan nilai tambah kepada kehidupan masyarakatnya.¹ Proses Pilkada dipengaruhi oleh berbagai unsur termasuk sistem pemilihan, peserta pemilihan sampai dengan masyarakat pemilihnya. Di dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar lokal dimana kepemimpinan masyarakat tradisional memiliki tempat penting maka sistem sosial budaya setempat akan menentukan. Artinya para pemimpin masyarakat setempat termasuk para pemimpin adat berperan dalam menentukan jalannya Pilkada. Peran lembaga-lembaga tradisional ini menunjukkan pentingnya tatanan masyarakat lokal.²

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buru sejak tahun 1999 setidaknya telah menghasilkan tiga orang bupati. Pertama adalah R.S. Sangadji sebagai pejabat sementara. Kedua adalah Drs. Husnie Hentihu bupati definitif dan ketiga atau yang sekarang memimpin adalah Ramli I. Umasugi,

S.Pi, M.M. yang berpasangan dengan wakilnya Amustofa Besan,SH. Kontestasi Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 lalu diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan dan pasangan Bakri Lumbesy- Ruli Hentihu. Kontestasi ini dimenangkan oleh pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan. Kandidat dengan Akronim RAMA (Ramli Umasugi-Amusatofa Besan) unggul dalam rekapitulasi perolehan suara komisi pemilihan umum Kabupaten Buru dengan total perolehan suara RAMA 41.678 (58,96%) sementara rivalnya yaitu pasangan Bakri Lumbesi-Ruli Hentihu (BARU) mendapat 29.016 suara (41,04%)³.

Kemenangan pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan dalam Pilkada Kabupaten Buru 2017 tidak terlepas dari peran elit adat Pulau Buru khususnya Kepala Soa, Hinolong atau Mat Gugul. Mereka sudah berkomitmen penuh untuk memenangkan pasangan ini dengan memainkan peran yang nyata. Elit adat kerap mengadakan ritual adat seperti bakar damar mengunjungi tempat-tempat pusaka untuk mengirim doa dan meminta petunjuk dari moyang-moyang (arwah leluhur), menghidupkan kembali tradisi lama seperti hubungan kait wait (adik-kakak) menyatukan emosi anak adat dengan slogan keda (orang adat) simbol pemersatu masyarakat buru semua itu dimaksudkan untuk menyatukan emosi orang Buru asli

1 UU No 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 pasal 1.

2 Alfridus SD, "Peran Tokoh Adat dalam Membentuk Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Politiconse*, 2 (Oktober 2021): 93.

3 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Buru," KPU Maluku, 7 April 2017, diakses 20 Juli 2021. <http://kpu-malukuprov.go.id/penetapan-pasangan-calon-terpilih-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-buru-oleh-kpu-kabupaten-buru>.

(keda Bupolo) terutama bersatunya kekuatan elit di wilayah pegunungan (Soa pa) dan elit adat yang menguasai bahagian wilayah pantai (Soa Pito) dan menjadi basis utama pasangan RAMA.⁴ Elit adat mejadi kunci kemenangan kandidat Calkada di setiap pergelaran Pilkada Kabupaten Buru maka ketika keberpihakan elit adat untuk memenangkan pasangan RAMA di Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 menentukan kemenangan pasangan ini secara telak terutama di kantong-kantong adat. Studi ini ingin mengkaji peran elit adat dalam pemenangan pasangan Bupati Ramli Umasugi-Amustofa Besan pada pilkada Kabupaten Buru tahun 2017. Studi ini mengangkat dua pertanyaan: pertama, Bagaimana struktur kelompok elit adat yang mempunyai pengaruh politik di Pulau Buru. Kedua, Bagaimana peran elit adat di Kabupaten Buru dalam Pilkada 2017.

Landasan Teori

Teori Elit

Studi ini menggunakan teori Gaetano Mosca (1939), *Vilfredo Pareto* (2011) dalam menjelaskan variabel elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan perannya dalam mempengaruhi dinamika politik dan kekuasaan di Pulau Buru. Selain itu studi ini juga menggunakan teori Suzane Keller (2005) untuk menganalisa anatomi elit dan fungsi elit dalam mengemban tanggung jawab sosial dalam masyarakat di Pulau Buru. Pareto (2011) menjelaskan bahwa sekelompok orang di dalam lingkungan masyarakat diperintah oleh kelompok kecil orang yaitu orang-orang yang memiliki kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Golongan minoritas yang memerintah itu yang di sebut elit, golongan ini memiliki akses di pusat kekuasaan. Elit yaitu individu-individu yang berhasil mencapai jabatan tinggi pada struktur masyarakat. Pareto (2011) menggarisbawahi

⁴ Wawancara dengan Amustofa Besan tanggal 24 Juli 2022.

bahwasanya elit berangkat dari kelas yang sama, yakni individu-individu kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu seperti musik, matematika, karakter dan moral. Mosca (1939) sependapat dengan Pareto (2011) yang mengatakan bahwa dari masyarakat – apakah dari sebuah bangsa baru berdiri atautkah bangsa yang sudah lama merdeka, bangsa besar maupun bangsa kecil akan selalu ada dua kelas utama: kelas yang memimpin (*a class that rules*) dan juga kelas yang dipimpin (*a class that is ruled*). Selanjutnya Mosca (1939) menjelaskan peran elit dalam politik dan kekuasaan, terutama terkait dengan kelas masyarakat umum:

The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first.” (Kelas pertama, untuk melakukan semua fungsi politik kelas pertama amat sedikit, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelas kedua merupakan mayoritas kelas yang dikendalikan oleh kelas pertama.⁵ Dalam menjelaskan teorinya Mosca (1939) dan Pareto (2011) selanjutnya membagi stratifikasi elit kedalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan masa umum (*non-elite*). Elit yang memerintah disebut juga sebagai *administratur-administratur*, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual juga elit politik yaitu orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik.⁶ Kelompok ini biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai

⁵ Gaetano Mosca dalam Darwis, “Elit Politik Lokal Dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali,” *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2 (Juni 2011):301.

⁶ Jayadi Nas, *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal* (Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, Lephass, 2007), 34.

pembawa perubahan.⁷ Secara lebih mendalam, Keller (2005) memfokuskan studinya tentang elit pada empat persoalan. Pertama, anatomi elit kaitannya dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elit itu muncul. Kedua, fungsi elit berhubungan dengan tanggung jawab sosial elit seperti apa. Ketiga, pembinaan elit berkaitan dengan siapa mendapat peluang untuk menjadi elit, imbalan yang di dapatkan, kewajiban dalam bentuk apa yang mereka dapat. Keempat, kesinambungan elit sehubungan dengan bagaimana dan kenapa para elit itu dapat bertahan, serta bagaimana dan kenapa diantara elit yang ada tidak bisa bekesinambungan.⁸

Elit Lokal (Tradisional)

Menurut Pareto (2011) dan Mosca (1939) salah satu kelompok elit yang tidak memerintah adalah elit tradisional. Kelompok ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu elit agama, pewaris budaya atau adat istiadat dan golongan bangsawan yang memiliki daulah atau wilayah. Keberadaan elit lokal dalam negara berkembang termasuk di Indonesia memiliki peranan penting dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.⁹ Suzanne Keller (2005), sebagaimana dikutip oleh Maurice Duverger, melihat peranan elit tradisional sebagai elit politik, yaitu orang atau golongan orang dengan pengaruh yang di miliki dalam proses pengambilan keputusan politik. Elit lokal merupakan individu atau orang yang mengendalikan peran dalam keputusan-keputusan politik di level lokal.¹⁰ Sebagai elit non pemerintah, kelompok ini meliputi elit adat seperti pemuka adat, orang-

orang yang berada di luar struktur kekuasaan dan minim akan modal kapital maupun religi untuk mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan.

Elit ini hanya memiliki modal sosial untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput.¹¹ Dengan demikian elit lokal merupakan individu yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Keputusan tersebut tak hanya dalam menentukan atau membuat kebijakan untuk kepentingan daerah saja, namun juga termasuk pada keputusan dalam mendukung dan menentukan calon kepala daerah yang akan memimpin daerah mereka. Keputusan elit lokal untuk mendukung calon kepala daerah yang dianggap tepat untuk meningkatkan pembangunan di daerah menjadi acuan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Oleh sebab itu elit yang berperan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah harus memahami figur dan kriteria calon yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin di daerah mereka.

Studi ini melihat peran elit di Pulau Buru sebagai bagian dari partisipasi politik. Miriam Budiardjo (1984) mendefinisikan partisipasi politik secara umum sebagai bentuk kegiatan individu atau kelompok orang yang berperan secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan ikut serta dalam memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Aktivitas ini meliputi kegiatan memberikan suara pada pemilihan umum, hadir pada rapat umum, menjalin hubungan (*contacting*) atau melakukan lobi (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, berperan dalam anggota partai politik maupun terlibat dalam organisasi sosial dengan aksi langsungnya, dan lain sebagainya.¹²

11 Duverger, *Sosiologi Politik* 157-167.

12 Herbert McClosky, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 367.

7 Muhammad Fadli, *Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara*, Tahun 2015 Tesis (Februari, 2018), 15.

8 Fadli, *Keterlibatan Elit*, 15.

9 Febri Rahmat, "Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Irwan Prayitno- Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar tahun 2015," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* (Juni 2020): 43.

10 Maurice Duverger, *Sosiologi Politik (terjemahan)* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada) (2005), 163.

Teori Miriam Budiardjo ini mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1984) yang melihat partisipasi politik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara pribadi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan negara. Partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (*political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).¹³ Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan P Nelson (1990) membagi partisipasi kedalam dua tipe yaitu partisipasi dipaksa (*mobilized*) dan partisipasi sukarela (*autonomous*). Menurut mereka perbedaan kedua jenis partisipasi ini hanya dalam bentuk prinsip, bukan kenyataan tindakan. Artinya warga negara melakukan partisipasi dalam kedua bentuk partisipasi ini.¹⁴

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini penulis mencari jawaban dari suatu permasalahan dan peristiwa dengan menggali informasi dengan lisan atau tertulis dan tidak dapat dihitung dengan angka. Studi ini menggunakan metode studi kasus, karena metode yang cocok untuk menggali cara atau proses (*how*) dan alasan (*why*) dari konteks yang diteliti.¹⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

13 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 368.

14 Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rina Reka Cipta, 1990), 9-10.

15 Johw W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 56.

wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumen. Dalam metode wawancara, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada berbagai pihak yang dipandang mempunyai keterlibatan dan pemahaman terhadap masalah ini termasuk tokoh dari elit adat, tim pemenangan, Bupati atau wakil Bupati Buru periode 2017-2022.

Dalam metode dokumen, peneliti menggali data dan informasi dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, misalnya berupa arsip-arsip tertulis, laporan maupun gambar dan data yang diekspos oleh penyelenggara Pilkada, KPU dan Panwaslu Kabupaten Buru terkait Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017. Selain dari penyelenggara Pilkada, penulis juga mengambil dari media cetak online dan off-line sehingga diperoleh data sekunder terkait dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisa menggunakan teori Miles dan Huberman (1984). Menurut kedua ahli ini kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis".¹⁶

16 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Struktur Elit Dalam Masyarakat Pulau Buru

Bentuk pemerintahan lokal di Pulau Buru memiliki ciri khas tersendiri, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Maluku. Kekhasannya tampak dari orientasi pada adat setempat, yang disebut-sebut sebelumnya sebagai petuanan atau wilayah kekuasaan adat (*regentschap*). Setiap petuanan di Kabupaten Buru dipimpin oleh seorang raja atau pati. Secara adat, sebuah *regentschap* membawahi beberapa desa atau kampung, juga kelompok

Disamping *regentschap* ada pula struktur sosial yang eksis di dalam masyarakat adat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat buru, struktur tradisional masyarakat asli Kabupaten Buru ini dikenal dengan nama Hinolong, Mat Gugul dan Soa. Lembaga-lembaga adat ini tidak memiliki hubungan hirarki dengan raja atau *regentchap*. Keberadaan mereka menciptakan rasa patuh masyarakat kepada mereka karena ketokohan dan kharisma yang mereka miliki.^{18,19}

Tabel 1. Peta Elit Lokal di Pulau Buru

Hinolog	Mat Gugul	Soa	
		Soa Dataran Tinggi	Soa Dataran Rendah
1. Hinolong	1. Mat Gugul Wakolo,	1. Giwagit (Bihuku)	1. Baman (Besa),
2. Lea Keha (Baman) penjaga matahari terbit	2. Mat Gugul Nalbesy (dataran Danau Rana petuanan Lisela),	2. Waelua (Latbual)	2. Dafa (Belen),
3. Hinolong Lea Sebo (Gibrihi) penjaga matahari terbenam	3. Mat Gugul Masbait,	3. Waetemn (Nurlatu),	3. Fumae (Dawn),
	4. Mat Gugul Mual (dataran Mengeswaen Petuanan Misrete)	4. Wahidi (Wael),	4. Kofan (Kofa)
		5. Kakhana (Latuhukom),	5. Widit (Tihun)
		6. Wagia (Tasane)	
		7. Migodo (Nacikit),	
		8. Mual (Solisa),	
		9. Tifu (Salasiwa)	

masyarakat lain yang termasuk di dalam wilayah pemerintahannya, sedangkan secara administrasi pemerintahan, *regentschap* berada langsung dibawah pemerintah kecamatan atau camat dan setiap *regentschap* di pimpin oleh seorang raja petuanan.¹⁷

Di samping *regentschap*, ada pula struktur yang eksis di dalam masyarakat adat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Buru, struktur tradisional masyarakat adat masyarakat Buru dikenal dengan nama Hinolong, Mat Gugul dan Soa. Lembaga adat ini tidak mempunyai hubungan hirarki dengan raja atau *regentschap*. Keberadaan mereka menciptakan rasa patuh masyarakat kepada mereka, karena karisma dan ketokohan mereka.

17 Paulus Jalvinus Soullisa, Anafina Fukabupolo (Tesis 2012), 43.

Peran Elit Lokal (Elit Adat) dalam kehidupan Masyarakat begitu penting menyelesaikan permasalahan adat di lingkungan marga atau Soa masing-masing maupun permasalahan antar marga hingga sampai pada masalah politik pemerintahan. Masyarakat mencurahkan segala persoalan dan meminta petunjuk kepada mereka. Sebagai elit adat para pemimpin adat ini mempunyai pengaruh untuk mengarahkan masyarakatnya dalam mengambil tindakan. Kepemimpinan elit adat ini tidak didapat melalui jalur formal

18 Muhammad Ayub Liwang, *Kekuatan dan Strategi Politik Dalam Pemilu: Analisa Terhadap Kemenangan Adnan Purichita Dalam Pilkada Kabupaten Gowa*, Skripsi (Juli, 2016): 30.

19 Paulus Jalvinus Soullisa, *Suatu Tinjauan Kritis Dari Perspektif Jender Terhadap Peran Kedudukan Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat di Buru Selatan*, Tesis (Juni, 2012): 42.

tetapi karena persetujuan dari anggota marga ada juga yang di dapat berdasarkan garis keturunan.

Mat Gugul

Mat Gugul disebut juga raja tanah. Mat Gugul merupakan jabatan tertinggi dalam masyarakat adat di Pulau Buru. Mereka adalah individu yang memiliki kekuasaan yang tidak ada batasnya. Mat Gugul diangkat atas persetujuan dari seluruh anak marga atau Soa untuk melanjutkan kepemimpinan adat. Mat Gugul biasanya membawahi beberapa Soa atau marga. di kabupaten Buru terdapat empat Mat Gugul yakni Mat Gugul Wakolo, Mat Gugul Nalbesy di dataran Danau Rana Petuanan Lisela dan Mat Gugul Masbait, Mat gugul Mual di dataran Mengeswaen petuanan misrete. Mat Gugul memiliki peran di dalam masyarakatnya untuk memutuskan perkara-perkara dalam masyarakat, mengatur dan menata keseimbangan antara manusia dengan Tuhan dan lingkungan, memimpin upacara-upacara keagamaan serta melakukan persembahan kepada leluhur.²⁰

Hinolong

Hinolong disebut juga pembuka pintu atau penjaga pintu, peran mereka dalam budaya masyarakat Buru yaitu mendampingi raja yang berhubungan dengan masyarakat dan orang luar. Hinolong terdiri dari dua bagian yakni Hinolong Lea Keha (Baman) penjaga matahari terbit dan Hinolong Lea Sebo (Gibrihi) penjaga matahari terbenam. Hinolong Baman membawahi 5 (lima) Kepala Soa dan Kepala Adat yang merupakan representatif dari 5 (lima) Soa yang ada di Dataran Rendah.²¹

Soa

Soa merupakan wadah berkumpul bagi setiap mata rumah dari clan atau marga dengan

20 Paulus Jalvinus Soulisa, *Suatu Tinjauan Kritis Dari Perepektif Jender*, Tesis (Juni 2012): 42.

21 Soulisa, *Suatu Tinjauan Kritis Dari Perepektif Jender*, 45.

mengikuti garis bapak. Hal ini tidak terlepas dari pola kekerabatan orang Buru yang lebih berorientasi pada pola perkawinan patrilineal yang disertai dengan pola menetap patril lokal yaitu tempat tinggalnya berpusat pada wilayah turunan ayah atau bapak. Kesatuan kekerabatan yang lebih besar dari keluarga batih adalah mata rumah atau fam yaitu suatu kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal. Soa dipimpin oleh seorang kepala Soa namun ada juga beberapa Soa mewadahi dua sampai lima marga atau fam, perkataan kepala Soa adalah sumber kepatuhan untuk didengar dan ditaati.²² Elit adat khususnya kepala Soa di lingkungan adat Buru dapat di bagi ke dalam dua bagian orang-orang asli (Geba Bupolo) yaitu bahagian adat wilayah pantai disebut Soa Pa dan bagian adat wilayah pegunungan disebut Soa Pito hidup di daerah pegunungan terutama di sekitar danau Rana dan gunung Date yang dianggap masih berpegang teguh pada budaya asli Pulau Buru sedangkan wilayah Soa Pa menempati wilayah pesisir pantai yang sudah bercampur dengan suku-suku pendatang (Geba Misnit) yang hidup di daerah pesisir pantai.²³

Keterlibatan Elit Adat dalam Politik dan Pilkada 2017

Keterlibatan elit adat dalam panggung politik Pulau Buru mendapat momentumnya saat reformasi 1999 digaungkan. Angin segar reformasi membuat tokoh adat mencoba peruntungan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui kandidasi Pilkada, menjadi kontestan atau mengambil bagian dalam tim kampanye, relawan tim dan lain sebagainya. Eksistensi mereka dalam Pilkada sangat diperhitungkan dan berdampak bagi pelaksanaan Pilkada seperti meningkatnya partisipasi pemilih maupun kemenangan

22 Soulisa, *Suatu Tinjauan Kritis Dari Perepektif Jender*, 45.

23 Eklevina Eirumkuy, "Suku Bangsa di Kabupaten Buru (*The Tribe in Buru Regency*)," *Jurnal Penelitian*, 7. 5 (November 2013):124.

pasangan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buru tahun 2017 para kepala adat (Kepala Soa, Hinolong, Matgugul) berperan penting dalam menyukseskan agenda pesta demokrasi lokal ini. Kharisma dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi daya tarik tersendiri untuk didekati para kandidat yang akan melibatkan mereka ke dalam tim kampanyenya. Hal ini karena para elit adat tersebut cukup memahami keadaan masyarakat sekitarnya. Pemahaman dan pengetahuan akan kondisi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di arus bawah

Peran elit lokal untuk menggalang dukungan masyarakat kepada kandidat kepala daerah cukup dengan membenamkan peran mereka ke dalam tim kemenangan atau menjadi relawan tim kampanye dengan begitu mereka dapat terlibat secara langsung seperti mengarahkan basisnya kepada kandidat yang mereka dukung. Elit adat adalah para pemimpin di dalam masyarakat terutama di dalam sukunya. Kepala adat ini memiliki latar belakang masing-masing. Ada yang merupakan fungsionaris partai politik yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Ada juga yang menjadi pejabat publik di jajaran birokrasi, kepala desa dan lain sebagainya.²⁴

Dalam kontestasi elit adat lokal memiliki kepentingan langsung dengan suksesi kepemimpinan kepala daerah, karena relevansi dengan masa depan pembangunan lima tahun mendatang. Pemimpin kedepan diharapkan memiliki kedekatan dengan komunitas adat yang sampai saat ini masih tertinggal dari aspek pembangunan. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong elit adat untuk aktif dalam konsolidasi kemenangan, melalui mobilisasi arus bawah terhadap calon bupati dan wakil bupati yang mereka dukung.

Aktifitas politik yang dilakukan oleh elit-elit

²⁴ Wawancara dengan Lutfi Rumkel pada tanggal 29 Juli 2022.

adat dalam konteks ini dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi politik sebab aktifitas yang dilakukan itu dilaksanakan dengan keikhlasan dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Elit adat turut ambil bagian dalam proses kampanye dengan mengarahkan warganya dalam memilih pasangan yang mereka dukung. Kajian ini telah menemukan bahwa elit adat telah berperan dalam Pilkada Pulau Buru 2019 dalam berbagai kegiatan termasuk, melakukan sosialisasi politik, mobilisasi politik, menjadi panitia dan Pilkada, menyelesaikan konflik, mendukung salah satu pasangan calon.

Melakukan Sosialisasi Politik

Elit merupakan minoritas masyarakat yang menguasai sumber daya kekuasaan pada wilayah tertentu. Seperti halnya juga dengan elit lokal dalam konteks ini tokoh adat mereka merupakan manusia pilihan yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka berpengaruh dalam sistem sosial tradisional di dalam masyarakat. Elit memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan sosialisasi politik sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih. Pengaruh elit di dalam masyarakat ibarat pinang belah dua, artinya pengaruh tidak dapat dipisahkan, dengan pengaruh dan kekuasaan yang berada di genggamnya. Elit memperoleh kesempatan yang begitu besar untuk melibatkan diri dalam peran-peran politik untuk melakukan sosialisasi di dalam masyarakat.

Keterlibatan elit kepada kandidat kepala daerah akan memudahkan para kandidat untuk melakukan sosialisasi di lingkungan elit. Elit berfungsi memfasilitasi kandidat yang mereka dukung untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Para elit dalam tim kemenangan kandidat penting untuk meraup simpati dari warga sebab elit adalah panutan dan referensi masyarakat untuk menentukan suara mereka. Di momentum pemilihan

lokal, peran elit sangat realistis mereka aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap kandidat yang mereka dukung dengan harapan masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan begitu angka partisipasi menjadi meningkat dan relevan mendukung kandidat yang mereka dukung seperti yang sudah di sampaikan pada saat sosialisasi²⁵. Tokoh adat di kabupaten ini memainkan peran penting di dalam lingkungannya melalui sosialisasi dan memberikan petunjuk kepada masyarakat atau sukunya agar tidak golput. Berbagai upaya di lakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat misalnya ikut memberikan dukungan suara terutama kepada kandidat yang di dukung oleh elit adat setempat.

Pada momentum pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 elit lokal/elit adat menunjukkan eksistensi yang sangat nyata. Peran elit adat cukup signifikan khususnya dalam melakukan sosialisasi kandidat yang mereka dukung. Alhasil terjadi antusias warga datang ke TPS untuk memilih calon bupati yang mereka suka. Hal ini tentu berpengaruh pada angkat partisipasi pemilih di Kabupaten Buru pada perhelatan Pilkada tahun 2017 yang ikut mengalami peningkatan. Keikutsertaan tokoh adat pada pilkada Kabupaten Buru dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Keterlibatan mereka dalam proses-proses politik sudah menjadi tanggungjawab tokoh adat untuk mewujudkan Pilkada yang damai guna menyukseskan pergelaran pesta demokrasi lima tahun sekali. Peran serta tokoh adat dalam melakukan sosialisasi sangat memberikan pengaruh bagi tingginya partisipasi pemilih di wilayah adat. Ketokohan yang dimiliki tokoh adat sebagai panutan dalam masyarakatnya dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu

untuk membantu memperlancar kegiatan sosialisasi. Tokoh adat cukup membantu penyelenggara dalam melakukan sosialisasi mengenai Pilkada di dalam lingkungannya. Apalagi pada setiap momentum di desa masyarakat selalu melibatkan mereka maka pengaruh mereka sangat berguna untuk mensosialisasikan pilkada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lutfi Rumkel, Dosen Ikro Buru;

*“Bapa Hinolong Bapa Mat Gugul kepala Soa adalah pemimpin yang di hormati dan dituakan bapa Hinolong Bapa Mat Gugul Kepala Soa merupakan pemimpin adat yang sangat di hormati disini. Mereka adalah tokoh sentral. Apa yang mereka ucapkan masyarakat selalu mendengar dan patuhi”.*²⁶

Sedangkan peran tokoh adat sebagai sarana penyampain pesan sosialisasi oleh penyelenggara Pilkada disampaikan juga oleh Gawi Gibrihi:

*“sosialisasi kadang-kadang kita lakukan di setiap kampung, dusun, kalau ada kegiatan, seperti acara adat, tahlilan ambil rambu. Biasaya pada acara-acara itu hadir banyak orang ada diskusi, cerita-cerita di tempat kegiatan kalau ada tokoh adat disitu ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain lain maka disitu tokoh adat menyampaikan tentang pelaksanaan Pilkada, bagaimana layaknya masyarakat berdemokrasi dengan baik”*²⁷

Menjadi Tim Kampanye Penyelenggara Pemilu

Selain melakukan sosialisasi politik dan mobilisasi politik pada masyarakat tingkat bawah, sebagian elit adat di Pulau Buru itu juga tergabung sebagai penyelenggara pemilu di level desa dan TPS menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS), tim kampanye

25 Abdul Chalik. “Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur,” *Jurnal Asosiasi dan Budaya Keislaman*, 2, 2.2 (Desember 2015), 368.

26 Wawancara dengan Luthfi Rumkel tanggal 29 Juli 2022.

27 Wawancara dengan Gawi Gibrihi tanggal 28 Juli 2022.

calon bupati dan wakil bupati. Peran elit adat sebagai Panitia Pemilu ini diungkapkan oleh anggota KPU Kabupaten Buru, Gawi Gibrihi:

“para tokoh adat di Pilkada Buru sebenarnya banyak yang menjadi petugas KPPS di desa dan dusun”²⁸

Aktivitas sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan literasi politik sekaligus tim pemenang kandidat serta sebagai penyelenggara Pemilu sangat membantu penyelenggara Pemilu untuk mensukseskan Pilkada, membuat penyelenggara pemilu dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah kabupaten buru tahun 2017. Peran serta para tokoh adat sebagai penyelenggara Pilkada sangat membantu kerja-kerja KPU untuk melakukan sosialisasi Pilkada. Hal ini karena sosok elit adat yang merupakan sosok teladan masyarakat juga sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh Gawi Gibrihi:

“ketika ada acara di dusun atau kampung, kami kerap minta ke mereka waktu sedikit untuk bisa menyampaikan sosialisasi di acara itu. Apalagi mereka yang hadir disitu adalah penyelenggara dari tokoh adat. Jadi untuk melakukan sosialisasi sangat mudah sekali”²⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pada pegelaran Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 keaktifan elit adat sangat tinggi yang disebabkan tingginya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh elit adat kepada masyarakat. Elit adat memang memiliki pengaruh dan kekuasaan di wilayahnya sehingga mereka dimasukkan dalam tim pemenangan. Para elit adat berperan sangat aktif dalam tim pemenangan untuk memperoleh simpati dari konstituen. Hal ini karena elit adat menjadi panutan dan referensi masyarakat

28 Wawancara dengan Gawi Gibrihi tanggal 28 Juli 2022.
29 Wawancara dengan Gawi Gibrihi tanggal 28 Juli 2022.

untuk menentukan pilihan politiknya. Selain keterlibatan mereka secara langsung, sebagian juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi pemilih. Tim kampanye melibatkan elit-elit lokal karena mengingat ketokohan mereka yang masih menjadi panutan di masyarakat sehingga penting untuk memasukkan mereka di dalam struktur Tim Kampanye Kabupaten maupun Kecamatan dan relawan desa.

Di dalam tim kampanye, elit adat gencar melakukan konsolidasi, merangkul semua elemen adat untuk memberikan dukungan dan bekerja kepada kandidat yang di restui tokoh adat. Dengan begitu peluang kemenangan kandidat yang mereka dukung semakin terbuka lebar. Kondisi ini disampaikan oleh Iksan Tinggapi ketua Tim Pemenangan pasangan Calon Ramli Umasugi-Umustofa Besan: *“pada Pilkada Buru 2017 peran tokoh adat (elit adat) cukup signifikan dalam mengkampanyekan pasangan yang mereka dukung”³⁰*

Apa yang disampaikan oleh Tim Kampanye RAMA senada dengan yang disampaikan Gawi Gibrihi:

“yang saya lihat, para tokoh adat ini banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya terkait dengan calon kepala daerah tertentu. Saya kira hal ini bagus setidaknya kami sangat terbantu untuk mensosialisasi pilkada 2017”³¹

Apa yang disampaikan oleh Gawi Gibrihi, ternyata sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Lutfi Rumkel. Dosen Universitas Iqro Buru ini mengungkapkan signifikansi peran elit. Mereka mengamankan kandidat yang mereka sukai yaitu calon bupati yang menjadi representasi kalangan adat Lutfi Rumkel menyampaikan:

“para elit adat ini, lebih mensosialisasikan kepada kandidat yang mereka idolakan

30 Wawancara dengan Ikhsan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

31 Wawancara dengan Ikhsan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

yakni kandidat wakil bupati dari kalangan adat asli Pulau Buru. Jadi faktor ini yang membuat kalangan adat terutama para kepala adat (kepala Soa) sangat aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat³²

Melakukan Mobilisasi Politik Arus Bawah

Peran strategis yang dilakukan oleh elit lokal dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Buru 2017 lainnya adalah melakukan mobilisasi pemilih agar kandidat yang mereka dukung bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Mobilisasi yang mereka galang bertujuan agar kandidat yang mereka dukung meraih kemenangan telak terutama kemenangan di kantong-kantong adat. Di ajang pesta demokrasi lokal, mobilisasi yang digalang oleh elit adat Kabupaten Buru yang tergabung dalam tim pemenangan maupun relawan secara suka rela di tingkat desa dan kecamatan yang mana kegiatan mobilisasi kampanye untuk memperoleh simpati dukungan yang dilakukan oleh elit-elit adat merupakan bentuk partisipasi politik. Besarnya mobilisasi arus bawah yang dilakukan elit kepada masyarakatnya membuka peluang terhadap partisipasi pemilih yang sangat luas sebagaimana yang diinginkan oleh elit adat. mereka sangat aktif menggerakkan dukungan kepada konstituen di akar rumput untuk memilih kandidat yang mereka dukung. Besarnya partisipasi pemilih adat pada pergelaran Pilkada akan berpengaruh terhadap perolehan suara kandidat yang didukung elit adat yang bermuara pada kemenangan kontestasi.³³

Dalam mobilisasi, para elit membangun komunikasi dengan kelompok kelompok yang ada di dalam masyarakat, menyatukan norma-norma ideal yang berlaku di masyarakat, dan melakukan berbagai cara untuk membangun solidaritas. Dalam tataran praktis mobilisasi

32 Wawancara dengan Luthfi Rumkel tanggal 22 Juli 2022.

33 Wawancara dengan Ikhsan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

politik didahului dengan kesepakatan-kesepakatan politik. Hal ini penting untuk mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat dengan begitu akan memudahkan mobilisasi arus bawah untuk memenangkan kandidat kepala daerah. Keberhasilan elit dalam menggalang mobilisasi akan berarti bagi sebuah kemenangan kandidat yang didukungnya. Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 memperlihatkan kuatnya mobilisasi elit yang berkontribusi bagi pemenangan kandidat yang didukung elit lokal. Hal ini tidak lepas dari signifikannya peran elit adat dalam melakukan mobilisasi suara arus bawah. Posisi elit yang kharismatik dan memiliki pengaruh dimanfaatkan untuk menarik simpati warga untuk menggunakan hak suara.³⁴

Dalam proses dan dinamika mobilisasi ini isu kedaerahan menjadi wacana strategis untuk mempersatukan elit adat yang ada di kabupaten baik elit di dataran tinggi maupun elit yang mendiami dataran rendah. Mobilisasi dilakukan untuk mendukung kandidat yang dianggap merepresentasi kalangan adat pada momentum Pilkada 2017. Amustofa Besan merupakan anak adat sekaligus tokoh adat yang bergelar Jaga Lihong Baman dari matra Hinolong Baman di dataran rendah Waeapo. Faktor ini menjadi alasan kuat untuk memobilisasi dukungan arus bawah untuk memenangkan pasangan Ramli Umasugi – Amustofa Besan pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017. Faktor kedaerahan dan seadat ini memperkuat bukti bahwa masih kuatnya nilai-nilai tradisional sebagai motivasi pilihan mereka. Pendekatan kultural ini terlihat pada istilah yang sering berkembang pada saat Pilkada yaitu *ana fuka bupolo* sebuah slogan yang kuat untuk penguatan mobilisasi solidaritas masyarakat adat.

Faktor kandidat wakil bupati Buru Amustofa Besan yang merupakan keponakan bapak Hinolong Baman dataran weapon juga

34 Wawancara dengan Amustofa Besan tanggal 23 Juli 2022.

menjadi magnet dukungan bagi kaum adat.³⁵ Kedekatan secara emosional antara calon wakil bupati Buru Amustofa Besan (Jaga Lihong Baman) dengan semua tokoh adat baik tokoh adat dataran rendah dataran tinggi dan juga tokoh adat di danau Rana maupun tokoh adat pesisir menjadi faktor penting dalam membangun solidaritas di kalangan masyarakat yang memudahkan langkah-langkah mobilisasi elit di arus bawah. Ritual adat semacam Bakar Damar dan mengunjungi tempat-tempat khusus dilakukan untuk mendapat petunjuk dan spiritual dari para leluhur (datuk dan moyang, orang tua) ritual adat semacam ini mampu menyatukan emosi dan persaudaraan di kalangan elit dan masyarakatnya. Fenomena ini ungkapkan oleh ketua tim pemenangan pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan, Iksan Tinggapi :

*“Para tokoh adat melakukan kegiatan ritual seperti bakar Damar yang dilakukan di tempat-tempat tertentu mengunjungi tempat-tempat sakral yang dianggap suci bagi masyarakat adat Buru, membaca doa di tempat suci kepada para leluhur orang tua moyang-moyang agar pemilihan ini mendapat berkat”*³⁶

Jadi peran elit adat dalam mengerahkan masyarakatnya ke TPS tidak terbatas pada pengikutsetaan dalam tim kampanye atau menjadi relawan melakukan mobilisasi menghadiri kampanye akbar yang diadakan tim pemenangan tetapi mobilisasi itu juga dilakukan oleh elit adat sebelum masa pencoblosan atau menjelang pencoblosan di TPS. Ajakan yang dilakukan oleh para elit adat juga untuk memastikan agar masyarakat tersebut tidak Golput dalam Pemilu, sebab hal itu akan merugikan kandidat mereka. Upaya agar tidak Golput dilakukan dengan cara menjaga warga agar mereka tidak terpengaruh

oleh pilihan-pilihan lainnya yang di gerakkan oleh kandidat lawan. Sehingga tugas relawan adalah mengawal jalannya proses pencoblosan di setiap TPS, memastikan warganya dari rumah sampai mereka benar-benar melakukan pemilihan di TPS.

Menyelesaikan Konflik

Peran elit politik dalam menyelesaikan konflik dalam momentm Pilkada tidak bisa disepelekan begitu saja. Hal terpenting yang harus dilakukan dalam menanggapi konflik dalam masyarakat dengan tindakan cepat dan tepat agar konflik Pilkada tidak terjadi. Disamping itu membuat cara untuk menghilangkan potensi konflik sebagai proses penyelesaian yang baik sangat dibutuhkan. Jika negara melakukan pendekatan formal melalui peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, maka elit politik dan partai politik dapat melakukan pendekatan non formal melalui serangkaian proses mediasi di luar aturan formal. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah eskalasi konflik, sehingga elit lokal dapat berhasil memainkan peran jangka pendeknya dalam mengelola konflik agar tidak berlanjut ke arah tindakan yang sifatnya masif dan destruktif. Hal yang demikian dapat dilakukan mengingat elit terlibat langsung dalam proses Pilkada serta memiliki kedekatan dengan pemilih atau konstituennya.³⁷ Terkait dengan peran elit adat dalam menyelesaikan konflik ini, Iksan Tinggapi, Ketua Tim pemenangan pasangan Ramli Umasugi - Amustofa Besan, menjelaskan:

“Khusus untuk Pilkada Kabupaten Buru. peran tokoh adat sangat kita perlukan. Hal ini disebabkan bahwa Pilkada dimana-mana sering terjadi konflik antara pendukung akibat tensi politik yang berkembang memanas, maka dari itu kita

35 Wawancara dengan Iksan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

36 Wawancara dengan Iksan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

37 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik di Pilkada* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 76.

*perlu tokoh-tokoh yang bisa menenangkan hati masyarakat yaitu mereka yang dekat dengan masyarakat, mereka yang didengarkan sehingga bisa mengedukasi mereka secara politik, supaya masyarakat bisa menyikapi Pilkada dengan damai”*³⁸

Pada dasarnya negara yang diwakili oleh lembaga pemerintah serta lembaga non-pemerintah dapat berperan dalam pencegahan konflik sosial. Peran tersebut dapat berupa pencegahan (preventif) maupun upaya yang bersifat penegakan hukum (represif). Peranan lembaga pemerintah tampak lebih kasat mata, sementara peranan lembaga non-pemerintah dalam hal ini diwakili oleh partai politik terkadang tidak teridentifikasi namun diduga justru berdampak signifikan di tingkat akar rumput (*grass root*). Peranan kedua lembaga tersebut senantiasa berjalan beriringan dan akan berdampak luas dalam meminimalisasi konflik sosial dalam pilkada langsung.

Elit politik, elit lokal sekiranya dapat bekerjasama dengan para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat melalui komunitas dalam mencegah konflik sosial. Komunitas masyarakat merupakan segala sesuatu tentang dialog atau forum antar warga, forum masyarakat adat atau forum lintas agama sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga perdamaian. Komunitas masyarakat sebagai elemen yang paling bersentuhan dengan masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih signifikan. Lembaga masyarakat memuat kemampuan untuk penggunaan mekanisme penyelesaian konflik pada level lokal dan nasional. Pada penyelesaian konflik di pengadilan, lazim ditemukan peranan komunitas masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selamanya berjalan mulus. Seringkali terjadi konflik sosial

³⁸ Wawancara dengan Ikhsan Tinggapi tanggal 22 Juli 2022.

yang tak terhindarkan antara pendukung kandidat. Banyak kasus Pilkada yang dilatari konflik yang melibatkan pendukung dan simpatisan kandidat kepala daerah. Konflik ini disebabkan oleh pergesekan antara pendukung pasangan calon kepala daerah, atau karena ketidakpuasan pendukung pasangan calon dengan hasil perhitungan suara. Pada posisi ini kepala adat dapat berperan sebagai dinamisator dalam penyelesaian konflik. Kehadiran mereka mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat karena dapat mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini diungkapkan oleh Gawi Gibrihi, Anggota KPU Kabupaten Buru:

*Peran tokoh adat pada Pilkada Kabupaten Buru sangat signifikan terutama jika terjadi konflik atau pertikaian antara pendukung kandidat bupati maka peran mereka bisa untuk mendamaikan konflik yang terjadi. Tapi Alhamdulillah syukur Pilkada 2017 di Kabupaten Buru dapat disalenggarakan dengan lancar dan damai peran tokoh adat sangat penting disini”*³⁹

Mendukung Pasangan Kandidat RAMA

Dalam kontestasi Pilkada, elit lokal memiliki perilaku tersendiri untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kandidat yang akan mereka dukung. Menurut Ramlan Surbakti (2010) bahwa perilaku politik berkaitan dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pada dasarnya, sebuah perilaku terutama dalam hal berkaitan dengan politik didorong oleh material. Karena itu perilaku politik pemilih dalam pilihan politik juga didasari oleh sebuah kepentingan ekonomi pemilih. Tidak bisa dipungkiri bahwa elit selalu menghitung situasi yang mampu dilihat dari untung-rugi pilihan tersebut. Selain itu, pemilih cenderung mempunyai pilihan atau keyakinan untuk

³⁹ Wawancara dengan Gawi Gibrihi tanggal 28 Juli 2022.

memilih partai tertentu. Tentu, ini sangat bersangkutan dengan perasaan untung untuk memenuhi kemauan tersebut.⁴⁰

Sistem demokratisasi memberikan ruang keterbukaan terutama dalam era otonomi daerah yang menjadi peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri seluas mungkin. Hal ini kemudian menjadi sebuah bentuk lokalitas yang berada dalam suatu ruang politik dengan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya seperti, identitas etnis, ras, agama dan budaya yang memiliki hak politik sederajat.

Elit adat di Kabupaten Buru (Kepala Soa, Hinolong, Mat Gugul) merupakan pemimpin di dalam komunitas sukunya mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar, peran mereka cukup penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Hal ini nampak dalam keterlibatan elit adat untuk memilih pemimpin di Kabupaten Buru. Situasi ini diungkapkan dalam wawancara dengan Ramsi Wamese:

*“Pertimbangan yang kami berikan kepada calon kepala daerah dalam Pilkada kemarin salah satunya dengan melihat kriteria dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung pada Pilkada itu. Memang hanya ada dua kandidat calon bupati tetapi kami lebih melihat dari keunggulan pasangan yang memiliki kedekatan secara adat dengan kami dan juga memiliki kemampuan untuk membangun Kabupaten Buru kedepan”.*⁴¹

Jadi dalam wawancara ini ternyata bahwa para elit adat ini menginginkan Ramli Umasugi-Amustofa Besan untuk memimpin Kabupaten Buru. Mereka mengapresiasi Ramli Umasugi mampu memimpin Kabupaten Buru pada periode sebelumnya melalui kebijakan-

kebijakan yang dibuat. Salah satunya adalah kebijakan pemberian insentif bulanan kepada tokoh adat (kepala Soa). Dukungan itu semakin kental ketika Ramli Umasugi mengambil Amustofa Besan (Jaga Lihong baman) salah satu tokoh adat kabupaten Buru menjadi calon wakil bupati berpasangan dengannya. Strategi ini kemudian menarik dukungan kepala adat kepada pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan semakin kuat.

Dalam memberikan dukungan kepada pasangan RAMA Iksan Tinggapi mengatakan tokoh adat (elit adat) di Kabupaten Buru memainkan peran yang sangat penting pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari pasangan yang diusung yang mana ada sosok calon wakil bupati Amustofa Besan yang menjadi daya tarik tersendiri di kalangan adat yang membuat tokoh-tokoh adat ikut mendukung pasangan Ramli Umasugi-Amustofa Besan. tokoh-tokoh adat ikut terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati mulai dari tim kabupaten sampai tim pemenangan di tingkat kecamatan dan desa. Peran dan kontribusi yang mereka berikan mendorong partisipasi masyarakat adat ke TPS cukup tinggi⁴² Situasi ini disampaikan oleh Lutfi Rumkel:

*“bahwa kepala adat memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan calon kepala daerah bupati Buru tahun 2017 yang di dasarkan pada anasirnya sendiri. Pilihan individu ini yang nantinya mereka membangun sosialisasi dengan masyarakatnya agar dapat menerima pandangannya mengenai kandidat yang di inginkan itu”.*⁴³

Ramsi Wamese dalam wawancara di rumahnya mengatakan bahwa:

“kami ini kan melihat juga dari kebijakan yang bagus yang bisa membangun

40 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, Widiarjana, Indonesia, 2010), 167.

41 Wawancara dengan Ramsi Wamese tanggal 25 Juli 2022.

42 Wawancara dengan Ramsi Wamese tanggal 25 Juli 2022.

43 Wawancara dengan Lutfi Rumkel tanggal 27 Juli 2022.

*kemajuan di negeri ini, dan yang terpenting adalah pemimpin yang bisa menjaga adat kami di Pulau Buru ini”.*⁴⁴

Jadi dalam posisi ini jelas bahwa meskipun di satu sisi ketertarikan kepala adat karena ada faktor Amustofa Besan, tokoh adat yang maju dalam Pilkada Buru tahun 2017 tetapi memang mereka mendukung pasangan kandidat ini berdasarkan keinginan Ramli Umasugi yang mau mengambil tokoh adat untuk berpasangan dengannya pada pilkada buru 2017 disamping kinerja Ramli yang agak dekat dengan tokoh adat

Dalam memberikan preferensi pilihan politiknya memang mereka dahulu melihat latar belakang atau prestasi yang di buat akan tetapi dalam konteks Pilkada 2017. Kecenderungan tokoh adat lebih melihat latar belakang emosional anak adat untuk mereka arahkan dalam mendukung kandidat tersebut. Menurut Amustofa Besan kepala adat dalam memberikan pertimbangan politiknya itu sebenarnya tidak terlepas dari pandangan mereka terkait kapabilitas calon kepala daerah. Idealnya pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2017 kemarin pasangan Kami Ramli-Amustofa di anggap memiliki kemampuan untuk membangun Kabupaten Buru yang lebih baik. Faktor lain yang paling terpenting adalah bahwa pemimpin kedepannya harus mampu memegang teguh nilai-nilai adat dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.⁴⁵

Sebagai pemimpin adat yang sangat bertanggungjawab terhadap adat istiadat di Kabupaten Buru, para pemuka adat menganggap dukungan maupun pilihan politik yang mereka berikan kepada kandidat yang mampu menjaga tradisi dan adat Buru menjaga dan merawatnya. Amustofa Besan dianggap calon yang tepat untuk melakukan hal ini. Jauh sebelum kontestasi,

Amustofa Besan sudah banyak menunjukkan kepeduliannya dalam merawat tradisi leluhur menjaga pusaka, menjaga bahasa asli Buru dan lain sebagainya. Ramli Umasugi yang sukses merawat komunikasi dengan tokoh adat, memberikan insentif bulanan kepada semua tokoh adat. Dari sini para elit adat itu mulai menaruh simpati kepada kedua pasangan ini yang dianggap cocok dalam pilkada 2017.

Amustofa Besan sebagai calon wakil Bupati Buru mendampingi Petahana Ramli Umasugi sangat berpengaruh terhadap dukungan dan soliditas kelompok adat, marga-marga asli yang ada di kabupaten Buru melalui pemimpin adatnya (kepala Soa). Sebagian besar dari mereka berikrar untuk mendukung pasangan ini. Bagi mereka Amustofa Besan adalah representasi anak adat yang tampil di panggung politik buru 2017 yang harus diperjuangkan. Ini bukan perkara Pilkada tetapi soal harga diri orang Buru. Dukungan yang diberikan oleh tokoh adat ini berkesinambungan dengan hasil perolehan suara di TPS-TPS adat yang memenagkan pasangan Ramli - Umasugi dengan kemenangan telak pada desa atau dusun yang mayoritas dihuni masyarakat adat. Rensi Wamese menyampaikan situasi ini sesi wawancara:

*“pada Pilkada Buru kemarin membangun kesepakatan bersama guna memberikan kontribusi positif untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat bupati tertentu. suara kepala adat ini kan sangat didengar oleh masyarakatnyaam”*⁴⁶

Senada dengan Rensi Wamese, Lutfi Rumkel juga menyampaikan:

“perkawinan antara pasangan calon juga melatarbelakangi dukungan full kalangan adat untuk mendukung pasangan ini. Ramli Umasugi adalah petahana bupati dari Golkar. Secara etnis Ramli Umasugi dari klan sula dan pasangan calon wakil bupati dari kalangan adat non partai.

44 Wawancara dengan Rensi Wamase tanggal 25 Juli 2022.

45 Wawancara dengan Amustofa Besan tanggal 24 Juli 2022.

46 Wawancara dengan Rensi Wamase tanggal 25 Juli 2022.

*Secara antropologi dua kandidat ini mewakili dua segmen pemilih besar di Kabupaten Buru*⁴⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, tampaknya dalam menentukan pilihan politik terhadap calon pemimpin setiap pemilih apakah itu masyarakat biasa atau tokoh adat akan mendasarkan pilihannya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan kedaerahan, suku atau ras. Hal ini memang diakui bukan instrument pertimbangan yang mutlak digunakan tetapi juga ada instrument lain seperti integritas serta kapabilitas yang mumpuni dalam memimpin. Namun isu-isu teknis seperti persoalan identitas kultural selalu tampil dalam konteks demokrasi langsung.

Kesimpulan

Studi ini berangkat dari suatu pertanyaan tentang konfigurasi, dan peran politik elit lokal dalam Pilkada 2017 di Pulau Buru. Kajian ini menggunakan kerangka teori Gaetano Mosca, *Vilfredo Pareto* (2011) tentang kategori elit dan perannya dalam politik, Teori Suzanne Keller (1964) tentang peran elit dan disintesis dengan teori Miriam Budiardjo dan Huntington dan Nelson (1984) tentang partisipasi politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan kajian dokumen dan metode analisa Milles and Huberman, Kajian ini sampai kepada kesimpulan. Pertama, dalam masyarakat Pulau Buru telah terbentuk struktur elit yang mempunyai pengaruh sosial budaya dalam masyarakat adat di Pulau Buru. Komunitas elit terstratifikasi dalam kelompok Mat Gugul, Soa dan Hinolog. Mat Gugul merupakan struktur elit tertinggi dalam masyarakat adat di pulau Buru. Mereka layaknya raja yang memiliki kekuasaan yang tidak ada batasnya.

Hinolog adalah struktur elit dalam budaya masyarakat Buru yang mendampingi raja dalam berhubungan dengan masyarakat dan orang luar. Soa adalah struktur elit yang dipimpin oleh kepala Soa. Dalam struktur ini setiap mata rumah dari klan atau marga dengan mengikuti garis bapak berkumpul.

Penelitian ini sebagaimana disampaikan oleh Mosca dan Pareto, menemukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buru tahun 2017 para elit adat ini berperan penting dalam menyukseskan agenda pesta demokrasi lokal ini. Kharisma dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi daya tarik tersendiri untuk dimanfaatkan dalam proses demokrasi dan juga mendukung para kontestan dalam memenangi Pilkada 2015. Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa dalam Pilkada Pulau Buru 2017, para elit ini telah secara intens memainkan peran politiknya sebagaimana dikemukakan oleh Mosca, Pareto dan Keller. Mereka juga melakukan partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh M. Budiardjo, Huntington dan Nelson. Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam politik yang mereka lakukan dalam berbagai bentuk; Pertama, melakukan sosialisasi politik termasuk menjadi panita dalam Pilkada. Dalam sosialisasi mereka selain menyampaikan hal-hal terkait dengan Pilkada, mereka juga menyampaikan kandidat yang mereka dukung. Kedua, melakukan mobilisasi politik agar masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada dan tidak melakukan Golput. Ketiga, menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Keempat, mendukung salah satu kontestan yang berkompetisi. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar elit mendukung pasangan RAMA yang akhirnya memenangkan Pilkada Pulau Buru 2017 ini.

47 Wawancara dengan Lutfi Rumakel tanggal 29 Juli 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik di Pilkada*. Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Chalik, Abdul. Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur." *Jurnal Asosiasi dan Budaya Keislaman*, 2. No 2.2 (Desember, 2015): 368.
- Creswell, W John, *Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Duverger, Maurice, *Sosilogi Politik (terjemahan)/ Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.*
- Eklevina, Eirumkuy. Suku Bangsa di Kabupaten Buru (The Tribe in Buru Regency), *Jurnal Penelitian*, 7. No 5 (November 2013):124.
- Fadli, Muhammad, *Keterlibatan ELit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, Tahun 2015*, Tesis,(Februari 2018).
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Huntington, Samuel. P dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta, Rina Reka Cipta, 1990.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku," Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Buru," KPU Maluku 7 April 2017. Diakses 20 Juli <http://kpu-malukuprov.go.id/penetapan-pasangan-calon-terpilih-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-buru-oleh-kpu-kabupaten-buru/>.
- Liwang, Muhammad Ayub, *Kekuatan dan Strategi Politik Dalam Pemilukada: Analisa Terhadap Kemenangan Adnan Purichita Dalam Pilkada Kabupaten Gowa*, Skripsi, 2016.
- McClosky, Herbert. dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. Revisi*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Miles, Matthew B. dan Hubbermas, A. Michael, *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mosca, Gaetano dalam Darwis. "Elit Politik Lokal Dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali," *Jurnal Studi Pemerintahan* 2 (Juni 2011): 3017
- Nas, Jayadi. *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin. Lepas, 2007.
- Paulus Jalvinus Soulisa. *Suatu Tinjauan Kritis Dari Perepektif Jender Terhadap Peran Kedudukan Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat di Buru Selatan*, Tesis, Juni, 2012.
- SD, Alfridus. "Peran Tokoh Adat dalam Membentuk Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Politiconse*. 2 (Oktober 2021): 93.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia, Widiasarana, Indonesia, 2010.
- Rahmat, Febri. "Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Irwan Prayitno- Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar tahun 2015", *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* (Juni 2020):43.
- Wawancara dengan Amustofa Besan, tanggal 24 Juli 2022.
- Wawancara dengan Lutfi Rumkel, pada tanggal 29 Juli 2022.
- Wawancara dengan Gawi Gibrihi, tanggal 28 Juli 2022.

Wawancara dengan Ikhsan Tinggapi, tanggal
22 Juli 2022.

Wawancara dengan Amustofa Besan, tanggal
23 Juli 2022.

Wawancara dengan Remsi Wamese, tanggal
25 Juli 2022.

Wawancara Dengan Lutfi Rumakel, tanggal
27 Juli 2022